

DETERMINAN POLITIK LUAR NEGERI, DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN IMPOR BERAS INDONESIA PERIODE PEMERINTAHAN TAHUN 2009 - 2014

Francine Wattimena¹⁾, Sukma Sushanti²⁾, Ni Wayan Rainy Priadarsini³⁾

^{1,2,3)}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: francinewattimena@unud.ac.id¹⁾, sukmasushanti@unud.ac.id²⁾,
rainypriadarsini@unud.ac.id³⁾

ABSTRACT

As a big country who known has many of rich nature resources, Indonesia is an agrarian country who produce many food crops for example is rice plant. Apart of surplus harvest, Indonesia government continuously do rice import from other countries for example is Thailand to fulfill the domestic stockpile. This research was made to find the things that determines the foreign policy, and also the other positive effect of the connection on the bilateral transaction between the two countries. This research was made using domestic determinant concept, foreign determinant concept, and also comparative advantage.

Key Word: Indonesia – Thailand, rice, determinants of foreign policy, comparative advantage.

1. PENDAHULUAN

Beras masih menjadi kebutuhan pangan yang utama di Indonesia. Sehingga menjadi sebuah hal yang esensial bagi negara untuk selalu menjaga pasokan beras dalam negeri, guna memenuhi kebutuhan konsumsi domestik. Data menunjukkan bahwa pasokan beras dari tahun 2004 hingga tahun 2014 sebesar 687.985.296 kilogram (Outlook Komuditas Pertanian Subsektor Tanaman Pangan, 2015) mampu memenuhi kebutuhan konsumsi pangan di Indonesia.

Tabel 1.1 Suplai Beras Beserta Total Kebutuhan Beras Masyarakat Indonesia, Periode Tahun 2006 - 2014

TAHUN	KETERSEDIAAN BERAS PRODUKSI DALAM NEGERI (TON)	TOTAL KEBUTUHAN BERAS (TON)
2006	54,506,436	30,898,438
2007	57,625,154	31,295,517
2008	60,450,068	31,695,462
2009	64,507,043	32,092,540
2010	66,830,179	32,488,380
2011	67,270,068	31,427,336
2012	70,001,749	31,805,398
2013	71,525,711	32,182,995
2014	71,234,644	32,555,485

* Sumber profil Komoditas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Komoditas Beras 2016, angka prediksi BPS diolah kembali oleh Francine Wattimena (2019)

Tabel 1.1 memberikan penjelasan, bahwa selama kurun waktu 8 tahun suplai beras di Indonesia mampu memenuhi kebutuhan konsumsi beras dalam negerinya.

Kondisi ketahanan pangan yang cukup baik berdasarkan angka dari tabel diatas tidak mengurungkan Indonesia untuk tetap melanjutkan kebijakan kegiatan impor beras dari negara lain di kawasan ASEAN, salah

satunya yakni Thailand dengan angka yang stabil dan berkelanjutan. Selama dua periode kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono kebijakan impor beras dilakukan secara intensif, yang dimulai pada tahun 2006 dirumuskannya MoU terkait perdagangan beras hingga kemudian diimplementasikan pada tahun 2007, dan diperpanjang kembali pada 2010, dan diimplementasikan pada tahun 2012-2016. Kerjasama perdagangan beras sejatinya telah dilakukan oleh kedua negara sejak lama, namun hanya bersifat perdagangan general bersamaan dengan komoditas lainnya, dan tidak ada pengkhususan bagi hanya satu komoditas beras.

Intensitas impor beras Thailand ke Indonesia ditunjukkan dengan data sebagai berikut:

Tabel 1.2 Volum Impor Beras Indonesia dari Negara Thailand

TAHUN	IMPOR BERAS THAILAND
2004	492,114
2005	129,422
2006	126,409
2007	363,640
2008	157,007
2009	221,373
2010	209,128
2011	938,696
2012	315,353
2013	94,634
2014	366,204

* Sumber Badan Pusat Statistik Indonesia, angka prediksi Pusdatin diolah kembali oleh Francine Wattimena (2016)

Tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2004 – 2014, Indonesia rutin melakukan impor beras dari Thailand, meskipun volumenya berubah setiap tahunnya.

Jika data impor beras Thailand pada tabel 1.2 dibandingkan dengan suplai beras domestik pada tabel 1.1 yang telah

dicantumkan sebelumnya, kedua data tersebut akan menunjukkan kondisi ketersediaan suplai pangan yang mengalami surplus yang cukup besar. Keadaan tersebut menciptakan kesalahpahaman akan impor beras dari luar negeri yang menyebabkan penolakan di masyarakat, yang kemudian coba diluruskan kembali oleh Menteri pertanian Anton Apriano dalam Dialog Liputan 6 Petang, Sabtu (09/09/06) yang menyatakan bahwa reaksi penolakan tersebut sebagai kesalahpahaman, "Impor tidak ada kaitannya dengan faktor produksi. Hanya untuk menambah cadangan untuk menanggulangi bencana dan lonjakan harga". Hal ini juga dipertegas melalui Buletin Konsumsi Pangan yang menyatakan bahwa pemerintah Indonesia menyalurkan beras impor Thailand ini menjadi cadangan Bulog serta dijadikan bibit untuk penanaman selanjutnya (Buletin Konsumsi Pangan 2013, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian hal. 11).

Terkait impor beras, ternyata Indonesia tidak hanya menerima dari Negara Thailand namun juga dari negara lain di kawasan Asia Tenggara lainnya, yang menarik adalah justru impor beras tertinggi berasal dari Negara Vietnam, tetapi nilai impor berasnya tidak sebanding dengan nilai kerjasama perdagangan Indonesia dengan Thailand di luar sektor komoditas beras. Sehingga keseriusan Indonesia untuk terus intensif bekerjasama dengan Thailand terkait impor beras, karena kalkulasi posisi Indonesia yang diuntungkan dari banyaknya kerjasama di sektor yang lain. Dengan kata lain, apabila Indonesia memberikan peluang bagi masuknya beras Thailand ke domestik Indonesia, maka hal tersebut akan

memberikan peluang yang lebih tinggi bagi Indonesia untuk mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal.

2. KAJIAN PUSTAKA

Jurnal penelitian ini akan dilengkapi dengan beberapa penelitian terdahulu yang ikut berpartisipasi dalam penulisan karya ilmiah yang berfokus pada kerjasama bilateral antar dua negara yaitu Indonesia dan Thailand serta kerjasama antar dua negara yang dilandasi oleh determinan pembangunan ekonomi. Penelitian pertama yang dikaji disini ialah jurnal dari Nadya Eka Putri dan Indra Pahlawan, S.IP., M.Si yang berjudul "Kebijakan RI Melakukan Kerjasama Sumber Daya Kelautan Perikanan dengan Thailand (2008 – 2013)". Jurnal ini berfokus pada kerjasama bilateral antara Indonesia dan Thailand, yang sama - sama menguntungkan kedua belah pihak. Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki garis pantai dengan panjang 81.000 km² serta posisi yang strategis yaitu diantara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia. Menyadari bahwa letak geografis Indonesia serta kekayaan sumber daya laut yang dimiliki Indonesia harus dilindungi dan dikembangkan dengan seoptimal mungkin sesuai dengan potensi lestari. Sadar akan kekayaan sumber daya laut namun tidak memiliki teknologi yang dapat mendukung pemanfaatan sumber daya lautnya, Indonesia melihat peluang kerjasama dengan negara Thailand yang memiliki sumber daya manusia dan teknologi yang lebih maju namun kurang memiliki sumber daya laut yang mumpuni. Selain itu, kerjasama ini juga diharapkan dapat memberantas *illegal fishing* di perairan

Indonesia, yang salah satunya dilakukan oleh nelayan Thailand.

Perjanjian kerjasama dibidang perikanan ini diharapkan dapat membawa iklim kerjasama timbal balik yang lebih bermutu sesuai dengan ketentuan – ketentuan dan prosedur yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Indonesia dan Thailand juga berharap dengan adanya kerjasama dibidang perikanan ini dapat mendukung terjadinya persahabatan diantara kedua negara. Kedua belah pihak negara juga sama – sama berjanji untuk melakukan upaya menjembatani sektor swasta dari masing – masing negara untuk bekerjasama dan saling menguntungkan. Selain itu, keinginan kedua negara untuk terus bisa masuk dan bertahan dalam perdagangan internasional di wilayah Uni Eropa membuat kedua negara memiliki tujuan yang sama dan dapat saling bahu membahu dalam meningkatkan mutu ekspornya masing – masing.

Kontribusi yang didapat dari jurnal diatas terhadap penelitian ini adalah, bahwa Indonesia dan Thailand memiliki hubungan kerjasama bilateral yang baik dalam bidang lain selain dalam kerja sama impor beras. Indonesia dan Thailand juga telah bersepakat untuk sama – sama saling meningkatkan pembangunan ekonomi kedua belah negara, salah satunya melalui fasilitas yang akan diupayakan bagi pihak swasta kedua belah negara untuk dapat bekerjasama. Indonesia dan Thailand juga sama – sama sadar akan kelebihan dan kekurangan masing – masing negara, sehingga dapat bersinergi dengan baik untuk menuju ke arah yang lebih baik. Dimilikinya satu tujuan yang sama, yaitu bertahan di pasar dagang Uni Eropa serta

memiliki persaingan yang sehat, juga diharapkan dapat terus menjaga kerjasama bilateral yang baik antara Indonesia dan Thailand.

Karya tulis ilmiah yang kedua berupa jurnal ilmiah yang ditulis oleh Baladia Perizade dengan judul, "Pengembangan Keunggulan Komparatif Bangsa Dalam Kemitraan Global". Menurut Baladia Perizade, dalam hubungan internasional saat ini, hampir tidak ada negara yang dapat memenuhi kebutuhan dalam negerinya sendiri. Untuk mencapai terpenuhinya kebutuhan nasional tersebut, maka setiap negara perlu menjalin kemitraan baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara lain baik dalam kawasan yang sama maupun dalam lingkup internasional. Dengan adanya kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, negara – negara tersebut saling menyatukan suara dalam menjaga kestabilan keamanan maupun ekonomi yang terjadi baik dalam kawasan negaranya maupun dalam lingkup internasional, guna menstabilkan angka investasi maupun ekonomi yang terjadi di masing – masing negara. Indonesia sendiri ikut dalam berbagai kemitraan dengan organisasi internasional, seperti International Monetary Fund, World Bank, WTO, ASEAN, serta kerjasama dengan negara lain baik bilateral maupun multilateral.

Keunggulan komperatif dalam perdagangan inetrnasional dapat terjadi apabila kedua negara, contohnya Indonesia dan Malaysia yang sama – sama memproduksi kopi dan timah menyadari bahwa Indonesia akan lebih menekan angka produksi dalam memproduksi kopi dan Malaysia akan lebih menekan angka produksi

apabila memproduksi timah. Lalu kedua negara bersedia untuk saling melakukan jual beli produk yang lebih menguntungkan bagi kedua negara. Menurut David Ricardo dalam bukunya, "Principles of Political Economi and Taxation (1817)", meskipun suatu negara kurang efisien dibanding (atau memiliki kerugian terhadap) negara lain dalam memproduksi kedua jenis komoditi seperti contoh diatas, namun tetap terdapat dasar untuk melakukan perdagangan yang menguntungkan kedua belah pihak.

Kontribusi positif yang penulis ambil dari jurnal diatas ialah, kesadaran yang dimiliki oleh negara – negara saat ini bahwa dipelukan adanya kerjasama antar negara maupun lembaga/organisasi luar negeri dalam memenuhi kebutuhan dan mecpitakan kesejahteraan dalam negerinya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan perdagangan internasional dengan menerapkan prinsip keuntungan komparatif yang membentuk tiap – tiap negara memiliki spesialisasi dalam perdangan melalui perhitungan efektifitas produksi.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan diterapkan merupakan tipe penelitian kualitatif deskriptif. Metode dari penelitian kualitatif sendiri memfokuskan dirinya pada makna subjektif, pendefinisian, metafora, dan deskripsi pada kasus – kasus yang spesifik (Neuman, 1997: 329).

Dalam upaya menjawab rumusan masalah di dalam penelitian ini, penelitian ini akan menguraikan permasalahan dengan format deskriptif. Melalui metode kualitatif deskriptif penelitian ini akan mencoba

memaparkan atau mendeskripsikan permasalahan berdasarkan data yang akan dikumpulkan dan akan dikaji berdasarkan teori dan konsep yang akan digunakan. Penelitian ini menganggap metode kualitatif deskriptif paling cocok dalam mengkaji secara mendalam dari proses pengambilan keputusan oleh pemerintah Indonesia serta alasan – alasan dibalik pengambilan kebijakan impor beras pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Jilid II.

3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan merupakan data dari telaah pustaka yang dilakukan oleh peneliti, yaitu berdasarkan data dari penelitian sebelumnya yang berasal dari buku, jurnal ilmiah, halaman – halaman dari website yang diterbitkan oleh lembaga pemerintahan, dan sumber informasi lainnya yang dirasa berkaitan dengan penelitian yang diangkat. Data sekunder yang akan diambil diharapkan dapat mendukung dan menjawab rumusan masalah dari penelitian yang diangkat.

3.3 Unit Analisa

Untuk membantu menguraikan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, peneliti menggunakan negara sebagai unit analisa untuk memperkecil ruang lingkup objek penelitian.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data yang disajikan dalam penelitian ini akan dikumpulkan menggunakan teknik penelusuran data di jejaring internet dan kepustakaan. Teknik penelusuran internet

merupakan pengumpulan data yang disajikan melalui jejaring internet yang kemudian diolah oleh peneliti. Teknik kepustakaan sendiri merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari, mengkaji, dan memahami bacaan – bacaan yang telah peneliti kumpulkan.

3.5 Teknik Penyajian Data

Upaya dalam menyajikan data akan peneliti uraikan menggunakan teknik tematik, dimana peneliti akan membagi hasil – hasil penelitian kedalam kelompok – kelompok penulisan yang dikelompokkan ke dalam beberapa subbab. Melalui subbab pertama, penelitian ini akan memaparkan gambaran umum mengenai ketersediaan beras dan kebutuhan pangan dalam negeri di Indonesia, serta kegiatan impor beras serta ekspor beras yang dilakukan pemerintah Indonesia secara umum.

Dilanjutkan dengan subbab kedua, yaitu pembahasan mengenai kebijakan impor beras yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam mencapai ketahanan pangannya. Pada subbab ini, akan digunakan determinan politik luar negeri, yang akan memfokuskan pada pemilihan kebijakan luar negeri yang terbentuk, serta keuntungan yang dimiliki Indonesia dalam melakukan kerja sama perdagangan tersebut, dan kemungkinan keuntungan lainnya yang dimiliki Indonesia dalam melakukan kerja sama dengan Thailand sebagai negara pengimpor beras. Juga akan menjabarkan kerja sama lain yang berlaku sebelumnya serta sejalan dengan kerja sama perdagangan beras Indonesia – Thailand.

4. HASIL PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Ketersediaan Beras dan Kebutuhan Pangan Beras di Indonesia

Indonesia sebagai negara yang dikenal sebagai negara agraris hingga saat ini masih berupaya untuk memenuhi kebutuhan beras masyarakatnya melalui produksi dalam negeri. Dengan penduduk yang mencapai 235 juta jiwa pada tahun 2009 (menurut Badan Pusat Statistik, 2017) dan tingkat konsumsi beras 139,15 kg/kapita/tahun (menurut Outlook Padi, 2013), Kementerian Pertanian Indonesia memiliki target untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan selama periode tahun 2010 – 2014. Targer tersebut dituangkan melalui Rencana Strategis Ditjen Tanaman Pangan Tahun 2010 – 2014, dan salah satu strategi yang digunakan dalam meningkatkan produksi pangan ialah melalui Catur Strategi Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, yaitu:

1. Peningkatan produktivitas
2. Perluasan Tanam
3. Pengamanan Produksi
4. Pengembangan Kelembagaan dan Pembiayaan.

Produktivitas tanaman padi sendiri diukur melalui dua variable pendukung, yaitu luas panen dan hasil rata – rata padi per hektar yang akan digambarkan melalu tabel statistik 2.1.

Tabel 2.1 Pergerakan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Per Wilayah di

Indonesia, Tahun 1999 – 2015

Wilayah	TAHUN	Luas Panen		Produksi		Produktivitas	
		Luas Panen	Perubahan (%)	Hasil	Perubahan (%)	Kg/ha	Perubahan (%)
Jawa	1999 - 2013	5.966.070	-0,02	31.592.433	-2,08	52,93	-3,13
	2011 - 2015	6.323.340	0,31	36.715.419	1,23	57,96	0,91
Luar Jawa	1999 - 2013	6.459.273	1,41	26.834.965	3,04	38,44	3,13
	2011 - 2015	7.385.090	2,68	33.782.401	4,28	46,71	1,55
Indonesia	1999 - 2013	12.425.343	1,01	58.427.398	2,49	47,13	1,37
	2011 - 2015	13.718.430	1,06	70.497.820	2,64	51,37	1,06

* Sumber Outlook Padi Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Kementerian Pertanian, Tahun 2013 dan 2015. Diolah kembali oleh Fransca Widiana (2017).

Melalui tabel 2.1 selama periode waktu 1999 – 2013, dapat ditunjukkan bahwa peningkatan terhadap luas panen di Pulau Jawa tetap bertambah meski cenderung stagnan yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan dibawah 1%. Sementara di luar Pulau Jawa, peningkatan terjadi lebih pesat dengan angka 1.41% per tahunnya. Selama periode waktu 2011 – 2015, wilayah luar Pulau Jawa kembali menunjukkan kontribusi yang cukup signifikan, yang ditunjukkan melalui peningkatan sebesar 2.68% per tahunnya selama lima tahun terakhir. Dalam sisi produktivitas dalam kedua jangka waktu tersebut, produktivitas di luar Pulau Jawa masih lebih dominan dibandingkan dengan produksi dalam Pulau Jawa.

Neraca perberasan Indonesia sendiri dihitung berdasarkan proyeksi stok beras dalam negeri untuk konsumsi dan proyeksi permintaan beras. Ketersediaan beras dihitung melalui konversi produksi padi dalam bentuk gabah kering giling setelah dikurangi penggunaan padi/ gabah untuk bibit/ benih, pakan maupun tercecer dalam bentuk gabah dan dikonversi menjadi setara beras dengan konversi sebesar 62,74%. Hasil perhitungan tersebut akan menjadi patokan kebutuhan beras yang digunakan untuk konsumsi setelah dikurangi jumlah kebutuhan untuk makanan ternak dan beras yang tercecer. Beras bersih siap konsumsi akan menjadi beras yang dapat dipergunakan langsung atau dikonsumsi oleh rumah tangga setelah

dikurangi oleh besaran beras yang digunakan untuk keperluan industry non pangan.

Selanjutnya akan ditunjukkan prediksi surplus maupun defisit ketersediaan beras dalam negeri melalui tabel 2.5 di bawah.

Tabel 2.2 Proyeksi Surplus/ Defisit Beras di Indonesia Priode Tahun 2009 – 2015

Tahun	Ketersediaan untuk Konsumsi (ton)	Permintaan Konsumsi (ton)	Surplus/ Defisit (ton)
2009	37,655,000	32,700,250	4,954,750
2010	38,437,000	33,187,275	5,249,725
2011	37,379,730	33,449,336	3,930,394
2012	39,255,786	33,947,731	5,308,055
2013	39,378,001	34,453,552	4,924,449
2014	39,383,725	34,966,910	4,416,815

* Sumber Outlook Padi Pusat Data (2013 & 2014) dan Badan Pusat Statistik (2017). Diolah kembali oleh Francine Wattimena (2017).

Tabel 2.2 data menunjukkan bahwa dalam periode tahun 2009 – 2015 telah terjadi surplus beras yang didapat melalui produksi padi dalam negeri Indonesia sendiri. Hasil surplus/ defisit didapat dari ketersediaan beras untuk konsumsi dikurangi dengan permintaan konsumsi.

Melalui tabel ini, dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya Negara Indonesia dapat memenuhi kebutuhan berasnya berdasarkan produksi dalam negerinya sendiri.

Selama periode tahun 1983 – 2014, pola perkembangan ekspor dan impor Indonesia telah mengalami turun naik yang cukup signifikan. Pada kurun waktu tahun 1983 hingga 2014, volume impor beras meningkat tinggi dengan kirsan nilai impor 909,38 ton atau terjadi peningkatan dengan kisaran 523,09% per tahun. Namun pada tahun 2008 – 2009 dan 2012 – 2013 Indonesia sempat mengalami penurunan volum impor beras dengan nilai antara 13,48% hingga 87,35% pada tahun 2013.

Tahun 2012 Indonesia tercatat melakukan kegiatan ekspor beras ke

beberapa negara di wilayah Asia, yaitu: (1.) Timor Leste dengan nilai volume sebesar 499 ton dengan nilai perdagangan mencapai 384,79 ribu US\$. (2.) Singapura dengan nilai volume sebesar 350 ton dengan nilai perdagangan mencapai 521,06 ribu US\$. Serta Amerika Serikat dengan volume 103 ton, Jerman 83 ton, Malaysia 31 ton, dan Jepang 12 ton. Tabel 2.6 akan menunjukkan volum ekspor dan impor beras Indonesia selama kurun waktu tahun 2009 - 2014.

Kerjasama bilateral yang dilakukan oleh Indonesia dan Thailand dalam usahanya memenuhi kebutuhan dalam negerinya masing – masing mengalami kemajuan diberbagai bidang kerjasama. Seperti yang telah disepakati dalam Komisi Besar Republik Indonesia dan Thailand, kerjasama ini tidak hanya dilakukan dalam bidang perdagangan yang saling menguntungkan kedua negara, tetapi juga kerjasama yang dapat saling membangun negara yang bersangkutan seperti halnya dalam bidang politik, pertahanan dan keamanan, dan lain – lain.

1. Kerjasama Bidang Pertahanan dan Keamanan
2. Kerjasama Bidang Pertanian
3. Kerjasama Sosial Budaya

4.2 Determinan dalam Pengambilan Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Sub bab ini akan mendeskripsikan mengenai determinan – determinan yang mempengaruhi kebijakan luar negeri yang dibentuk oleh pemerintah dalam penelitian ini, yaitu kebijakan impor beras Indonesia dari Thailand dan pengaruhnya terhadap berjalannya kerjasama lain diantara kedua

negara. Peneliti akan menjelaskan dengan menggunakan konsep seperti yang telah disebutkan dalam sub bab kerangka pemikiran di atas. Peneliti akan menganalisa kebijakan luar negeri tersebut ke dalam 2 jenis determinan, yaitu faktor domestik dan faktor internasional yang akan peneliti coba kaitkan menggunakan konsep keuntungan komparatif (*comparative advantage*). Determinan yang akan peneliti gunakan dalam faktor domestik ialah ketertarikan ekonomi dan keputusan luar negeri, yang bertujuan menggambarkan apa saja ketertarikan Indonesia atas Thailand di balik kegiatan impor beras tersebut. Kemudian akan dilanjutkan dengan faktor internasional yaitu aliansi, yang dalam penelitian ini mencoba melihat aliansi antar kedua negara dalam kawasan dan organisasi ASEAN yang menjadi landasan kebijakan luar negeri yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Pengambilan keputusan dibalik kedua determinan tersebut juga akan peneliti coba jelaskan menggunakan konsep keuntungan komparatif (*comparative advantage*). Selanjutnya peneliti mengkaitkan determinan tersebut dengan kerjasama yang terbentuk sejalan dengan dilakukannya kerjasama impor beras antara Indonesia dan Thailand.

Terlepas dari semua visi pembangunan nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, terdapat salah satu upaya yang harus disadari dalam mewujudkan terpenuhinya segala aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yaitu dengan menyadari kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang yang dimiliki oleh Negara Indonesia. Kesadaran atas potensi yang dapat menghasilkan, serta

mengetahui dan mengerti kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi atau kurang terpenuhi oleh produksi dalam negeri; dapat membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan membentuk kebijakan yang strategis. Dengan modal sumber daya alam dan energi yang beraneka ragam, sumber daya manusia yang memiliki potensi dan kreatifitas tinggi, lahan yang luas dan subur, serta lokasi geografis yang strategis dengan jalur transportasi baik melalui darat, udara, maupun laut; Indonesia memiliki keunggulan dalam segala bidang dalam melakukan kerjasama perdagangan maupun membuka peluang investasi bagi negara - negara asing.

Pembentukan kebijakan yang tepat sasaran juga dapat terbentuk dengan didukung oleh sinergi yang kuat antar lembaga - lembaga pemerintahan yang saling bersangkutan. Perlu disadari bahwa untuk mencapai sasaran dari rencana pembangunan nasional tertentu, perlu adanya kerjasama antar lembaga pemerintahan sehingga dapat memperluas cakupan dan meningkatkan nilai hasil dari sasaran pembangunan yang diharapkan. Membentuk kebijakan antar pemegang kekuasaan yang efektif dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat, efisiensi penggunaan sumber daya, dilakukannya pengawasan dan konsistensi pemerintah dalam menjaga berjalannya kebijakan dan kerjasama yang terbentuk, diyakini dapat meningkatkan keberhasilan dari sebuah kebijakan tertentu.

Dibentuknya kebijakan yang strategis dan tepat sasaran ini sesuai dengan konsep keuntungan komparatif yang telah peneliti jelaskan pada sub bab kerangka pemikiran di

atas. Dimana keuntungan komperatif dalam kerjasama internasional antara Indonesia dan Thailand didapat apabila Indonesia mengimpor suatu komoditi yang jumlah sumber dayanya terbatas atau biaya produksinya lebih tinggi dibanding apabila Indonesia mengimpor dari negara Thailand, dan mengekspor suatu komoditi yang memiliki sumber daya melimpah yang tidak dimiliki oleh negara Thailand atau memiliki biaya yang relatif lebih rendah apabila mengimpor dari Indonesia daripada memproduksinya sendiri. Diluar kerjasama ekspor impor Indonesia – Thailand, terdapat beberapa kerjasama lain yang akan peneliti angkat sebagai determinan dibalik kebijakan luar negeri yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam melakukan kerjasama dengan negara Thailand

Determinan Domestik:

1. Ketertarikan Ekonomi

2. Keputusan Luar Negeri

Melalui 2 determinan diatas, ada beberapa kerjasama yang dapat dilihat memiliki signifikansi terhadap kepentingan Indonesia dalam memenuhi kebutuhan dalam negerinya, yaitu:

1. Ekspor

Sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang beragam baik dalam bentuk migas dan non migas; hasil pertanian yang beragam, hasil industri, serta pertambangan; kerjasama Indonesia – Thailand merupakan salah satu kerjasama bilateral dalam regional ASEAN yang memiliki nilai kerjasama yang tinggi dan beragam.

2. Impor

Dalam usahanya mencapai tujuan pembangunan nasional, pemerintah

Indonesia menggunakan prinsip keuntungan komperatif guna memenuhi kebutuhan dalam negerinya dengan perhitungan yang lebih efektif dan efisien. Dimana Indonesia melihat bahwa dengan melakukan impor barang atau jasa dari Thailand, maka Indonesia lebih menghemat sumber daya yang terbatas jumlahnya maupun jasa, serta biaya dan teknologi dalam memproduksi barang atau jasa tersebut. Thailand sebagaimana telah peneliti uraikan pada gambaran umum diatas merupakan negara agraris yang juga merupakan salah satu negara anggota ASEAN penghasil beras terbesar di Asia Tenggara. Melalui kegiatan impor, salah satunya impor beras sebagaimana beras merupakan salah satu sumber ekonomi terbesar negara Thailand, peneliti mencoba menyimpulkan bahwa Indonesia mencoba melakukan kegiatan impor pada barang ekspor strategis yang dimiliki Thailand yang juga tidak merugikan Indonesia. Sebagaimana telah disampaikan pada sub bab gambaran umum, beras digunakan sebagai bibit berkualitas dan sebagai cadangan beras nasional oleh pemerintah Indonesia. Dalam hal lainnya, barang – barang impor asal Thailand juga memiliki spesifikasi yang tidak dimiliki Indonesia, dalam hal ini dapat dilihat pada tabel – tabel yang akan peneliti sertakan dibawah, bahwa kegiatan impor yang dilakukan oleh Indonesia masih lebih kecil nilainya dibandingkan kegiatan ekspor yang dilakukan Indonesia menuju Thailand. Barang – barang yang diimpor dari Thailand juga dapat membantu produksi dalam negeri, dan menjadi bahan tambahan dalam memproduksi barang yang akan di ekspor ke luar negeri.

3. Investasi Luar Negeri

Investasi luar negeri sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dalam negeri dengan jumlah yang besar, salah satunya dengan investasi asing yang bersumber dari negara Thailand. Sumber daya alam yang beragam dengan jumlah yang memadai, letak geografis Indonesia yang strategis, ditambah dengan sumber daya manusia yang besar dan peningkatan teknologi yang terus diupayakan, diharapkan dapat menjadi modal bagi Indonesia untuk dapat menarik investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Investasi luar negeri sendiri memiliki kolerasi positif terhadap kegiatan ekspor dan impor. Dengan adanya investasi di dalam negeri, diharapkan akan meningkatkan kegiatan impor barang modal dan bahan baku penolong, dimana produk – produk ini sebagian besar akan digunakan untuk memproduksi produk untuk keperluan di dalam negeri dan untuk keperluan ekspor.

Indonesia dan Thailand memiliki lembar persetujuan yang berjudul Persetujuan Antar Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal, yang bahkan sudah dibuat di Jakarta pada tanggal 17 Februari 1998 dan berlaku sejak tanggal 30 Oktober 1998. Di dalam persetujuan ini kedua negara berkeinginan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi antar kedua negara dengan menciptakan iklim yang menguntungkan bagi penanaman modal oleh para penanam modal dari satu pihak di wilayah pihak lain guna meningkatkan kemakmuran di kedua negara.

Selain itu, menurut data yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri dalam regional Asia Tenggara khususnya Thailand, mengeluarkan data yang berupa bidang usaha yang menjadi fokus minat para investor Thailand di Indonesia. Bidang tersebut berupa:

1. Pengolahan makanan
 2. Konstruksi
 3. Pasokan air
 4. Suku cadang mobil
 5. Produk kimia
 6. Pariwisata
 7. Perhotelan
 8. Retail/mall.
4. Kerjasama perikanan

Salah satu faktor pendorong yang menjadi dasar bagi peneliti dalam mengangkat tema penelitian ini adalah adanya pernyataan yang tertulis di dalam jurnal Diplomasi Indonesia Tahun 2011 yang diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang menyatakan bahwa kedua negara, yaitu Indonesia dan Thailand bertekad untuk memberikan perhatian khusus pada kerjasama yang saling menguntungkan di bidang perikanan dan beras sebagai bagian kerjasama ketahanan pangan. Dalam hal ini, perikanan dan beras ditekankan secara khusus dan jelas memiliki nilai ketertarikan khusus dalam kerjasama yang terjalin diantara kedua negara.

Melalui data yang peneliti sertakan pada penulisan diatas bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang mengimpor beras dari salah satu negara asal utama yaitu Thailand, meskipun Indonesia sendiri merupakan negara agraris yang mampu memenuhi kebutuhan beras dalam negerinya. Terlihat

adanya ketertarikan ekonomi yang dimiliki Indonesia atas adanya kerjasama dibidang perikanan antara Indonesia dan Thailand, dimana Indonesia merupakan salah satu negara dengan garis pantai terpanjang ke – 4 di dunia dan negara di Asia Tenggara dengan perairan Zona Ekonomi Eksklusif penghasil ikan terbesar dalam kawasan tersebut.

Perjanjian mengenai kerjasama perikanan antar Indonesia dan Thailand sendiri telah dibentuk pada tanggal 16 September 2002 yang berisikan mengenai *Total Allowable Catch* (TAC) atau jumlah penangkapan ikan yang diperbolehkan pada perairan *Indonesian Exclusive Economic Zone* (IEEZ). Maksud dari perjanjian ini sendiri adalah untuk menciptakan suasana kerjasama yang lebih menjanjikan untuk kedua belah pihak negara, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan adanya peraturan ya disetujui oleh kedua belah pihak. Perjanjian ini berisikan prosedur – prosedur penangkapan ikan, yang juga mencakup konservasi laut, pembangunan perikanan yang berkelanjutan, dan mengurangi adanya tindak pencurian ikan yang terjadi di laut Indonesia.

Determinan Luar Negeri:

Aliansi

Indonesia sebagai negara yang berdaulat di dunia internasional, menjaga eksistensinya dengan ikut bergabung dalam aliansi organisasi internasional baik dalam cakupan global, regional, maupun multinasional. Salah satu dari organisasi tersebut merupakan organisasi ASEAN yang beranggotakan negara – negara dalam regional Asia Tenggara. Keikutsertaan Indonesia dalam organisasi ASEAN ini diharapkan dapat menguatkan dan

tetap menjaga kestabilan Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat di kawasan Asia Tenggara. Selain daripada itu, dengan tergabungnya Indonesia dalam organisasi ASEAN menjembatani Indonesia dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri yang harus dicapai dengan melakukan kerjasama dengan negara lain.

Melalui RPJP 2005 -2025 terdapat tujuan pembangunan jangka panjang yang ingin dicapai Indonesia melalui sasaran – sasaran pokok, yang dalam poin H terdapat sasaran berupa, “Terwujudnya peranan Indonesia yang meningkat dalam pergaulan dunia internasional”. Selain itu, dalam misi Kementerian Luar Negeri tahun 2010 – 2014 terdapat poin untuk, “Memperkuat peran dan kepemimpinan Indonesia dalam kerjasama ASEAN, ikut mendorong proses integrasi Komunitas ASEAN 2015 yang memberikan manfaat bagi Indonesia yang mandiri, maju, bersatu, demokratis, aman, adil, makmur dan sejahtera”. Ditambah salah satu tujuan/ sasaran dari Kementerian Luar Negeri tahun 2010 – 2014 yaitu, “Meningkatkan peran dan kepemimpinan Indonesia dalam pembentukan komunitas ASEAN bidang politik dan keamanan, ekonomi, dan sosial budaya”.

ASEAN sendiri sebagai organisasi kawasan memiliki poin – poin yang menjadi prinsip dasar dalam menjalankan organisasinya, seperti:

1. Menghormati kedaulatan dan identitas setiap negara anggotanya;
2. Bersama – sama berkomitmen untuk menjaga keamanan kawasan;

3. Menolak untuk melakukan ancaman atau menggunakan kekuatan yang bertentangan dengan hukum internasional;
4. Menyelesaikan sengketa dengan cara yang damai, menjaga hak asasi manusia, dan tidak mencampuri urusan dalam negeri sesama anggota organisasi.

Di dalam organisasi ASEAN sendiri dibentuk Masyarakat ASEAN yang merupakan kesatuan bangsa Asia Tenggara yang sama – sama ingin membangun kawasannya dari keterpurukan ekonomi dengan cara berpikir yang maju. Pembentukan Masyarakat ASEAN sendiri dilatarbelakangi, antara lain, oleh adanya pengaruh negatif krisis ekonomi yang menimpa negara – negara anggota ASEAN pada tahun 1997 yang kemudian menjadi salah satu awal mula pemikiran ASEAN untuk menciptakan kawasan yang memiliki daya tahan ekonomi. Selain itu, terdapat faktor – faktor lain yang mendukung tersebturnya masyarakat ASEAN seperti isu terorisme, perdagangan narkoba, kejahatan lintas batas, dan kelestarian lingkungan hidup. Berdasarkan kesepahaman atas faktor – faktor tersebut melalui *ASEAN Summit* ke 9 tahun 2003 di Bali, negara – negara anggota ASEAN setuju untuk membentuk Masyarakat ASEAN pada tahun 2020 dengan tiga pilar utama, yaitu:

1. Politik – Keamanan;
2. Ekonomi;
3. Sosial Budaya.

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sendiri memiliki empat pilar, yaitu:

1. Pasar dan basis produksi tunggal;
2. Kawasan ekonomi berdaya saing tinggi;
3. Kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata dan berkeadilan;
4. Kawasan yang terintegrasi dengan ekonomi global.

Kesetujuan para anggota untuk membentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN dituangkan pada cetak biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025 yang berisikan lima karakteristik yang saling menguatkan, kelimanya adalah:

1. Ekonomi berjalan dalam satu arah dan saling bersangkutan;
2. ASEAN yang memiliki daya saing dan inofatif;
3. Meluaskan jaringan kerjasama sesama anggotanya;
4. ASEAN berorientasi penuh pada masyarakat negara anggotanya;
5. ASEAN setingkat dengan organisasi kawasan inetrnasional lainnya.

Melalui keikutsertaannya dalam organisasi ASEAN ini, Indonesia terus berupaya untuk ikut serta dalam kegiatan – kegiatan yang ada di dalamnya sembari memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Salah satu bentuk dari kerjasama ekonomi yang diterapkan Indonesia adalah dengan melakukan kerjasama bilateral dan perdagangan dengan sesama negara anggota ASEAN, salah satunya yaitu negara

Thailand. Berdasarkan data – data, angka – angka, serta tabel – tabel yang telah peneliti paparkan pada penelitian ini, Thailand merupakan salah satu dari negara anggota ASEAN yang memiliki tingkat kerjasama maupun kegiatan impor dan ekspor yang tinggi bersandingan dengan beberapa negara anggota ASEAN lainnya.

Sehingga peneliti mengaitkan determinan luar negeri, yaitu aliansi sebagai salah satu faktor dalam pembentukan kebijakan impor beras Indonesia dari negara Thailand. Dengan menggunakan konsep keuntungan komperatif untuk menambah ketertarikan Thailand dalam melakukan kerjasama dengan Indonesia, peneliti kembali mengaitkan pada determinan ketertarikan ekonomi dan kebijakan luar negeri yang diambil berdasarkan konsep keuntungan komperatif yaitu melihat beras sebagai salah satu barang hasil produksi utama negara Thailand.

5. KESIMPULAN

Melalui paparan yang telah peneliti uraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa determinan yang mendorong pemerintah Indonesia dalam membentuk kebijakan luar negeri, yaitu impor beras Indonesia dari negara asal utama Thailand adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri Indonesia dalam mencapai kesejahteraan nasional. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mencapai kesejahteraan nasional dijelaskan melauai bab 2, yaitu dengan melakukan kerjasama luar negeri menggunakan prinsip keuntungan komparatif, dimana negara Indonesia melakukan spesialisasi pada produk yang akan diekspor ke Thailand, dan mengimpor produk yang menjadi spesialisasi negara Thailand tanpa mengurangi

keuntungan dalam sisi ekonomi maupun bidang – bidang lain yang akan diperoleh Indonesia melalui kerjasama tersebut.

Secara domestik, peneliti telah memaparkan pada bab 4 di atas bahwa terdapat determinan ketertarikan ekonomi dan keputusan luar negeri. Melalui kerjasama bilateral antara Indonesia dan Thailand dalam kegiatan impor ekspor, peneliti melihat terdapat banyak visi, misi, tujuan, serta langkah – langkah yang ingin dicapai pemerintah melalui kegiatan impor beras Indonesia melalui negara asal utama Thailand. Kegiatan yang terbentuk melalui determinan ketertarikan ekonomi dan kebijakan luar negeri antara lain:

1. Ekspor,
2. Impor,
3. Investasi luar negeri, dan
4. Kerjasama dalam bidang perikanan.

Melalui determinan internasional, peneliti melihat aliansi sebagai determinan yang mendorong pemerintah untuk membentuk kebijakan kerjasama luar negeri, yaitu impor beras melalui negara asal utama Thailand. Aliansi Indonesia terhadap Thailand dan keikutsertaan kedua negara dalam organisasi ASEAN, membentuk kedua negara untuk memiliki visi, misi, serta tujuan yang sama di dalam satu payung besar ASEAN. Kerjasama yang dilakukan kedua negara juga ikut mengaplikasikan langkah – langkah yang telah negara – negara anggota ASEAN setuju sebelumnya dalam membentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN, yaitu untuk mencapai peningkatan ekonomi bersama melalui usaha

kerjasama dengan negara – negara anggota lainnya. Thailand.

6. DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. 2016. *Tabel Dinamis*.
Dipetik pada tahun 2016:
<https://www.bps.go.id/site/pilihdata.html>.

Badan Pusat Statistik. 2017. *Tabel Dinamis*.
Dipetik pada tahun 2017:
<https://www.bps.go.id/site/pilihdata.html>.

Badan Pusat Statistik. 2018. *Tabel Dinamis*.
Dipetik pada tahun 2018:
<https://www.bps.go.id/site/pilihdata.html>.

Billah, M. Tassim. 2013. *Buletin Konsumsi Pangan*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Pertanian.

Billah, M. Tassim. 2013. *Buletin Triwulan Ekspor Impor Komoditas Pertanian*. Jakarta: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Kementerian Pertanian Indonesia.

Billah, M. Tassim. 2014. *Buletin Triwulan Ekspor Impor Komoditas Pertanian*. Jakarta: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Kementerian Pertanian Indonesia

Billah, M. Tassim. 2013. *Outlook Komoditas Pertanian Subsektor Tanaman Pangan: Padi*. Jakarta: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian.

Budiarjo, M. 2008. *Dasar – Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2010. *Diplomasi Indonesia 2010*. Indonesia: www.kemlu.go.id.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2011. *Diplomasi Indonesia 2011*. Indonesia: www.kemlu.go.id.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2012. *Diplomasi Indonesia 2012*. Indonesia: www.kemlu.go.id.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. 2013. *Pertemuan Indonesia – Thailand: Bahas Kebijakan Impor Produk Hortikultura dan Beras Indonesia*. Indonesia: Pusat Hubungan Kemendag.

Mas'oeed, M. 1994. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES.

Mintz, Alex and DeRouen, Karl. 2010. *Understanding Foreign Policy Decision Making*. United States of America: Cambridge University Press.

Suwandi. 2015. *Outlook Komoditas Pertanian Subsektor Tanaman Pangan: Padi*. Jakarta: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian.

The Asean Secretariat. 2017. *The Asean Carter*. Jakarta: Asean Secretariat.

The Embassy of Republic Indonesia of Indonesia Bangkok. 2010. *Update Indonesia*.

Royal Thai Embassy, Jakarta. 2017. *Thailand-Indonesia Relation*. Dipetik tahun 2017 dari website Royal Thai Embassy, Jakarta:
<http://www.thaiembassyjakarta.com/en/useful-information/thailand-indonesia-relation/>.

Yanuarti, Astri Ridha dan Afsari, Mudya Dewi. 2016. *Profil Komoditas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting: Komoditas Beras*.